

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN KEBUMEN

2023

Volume 8, 2024



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KEBUMEN

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN KEBUMEN

2023

Volume 8, 2024



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KEBUMEN**

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN KEBUMEN 2023

Volume 8, 2024

Katalog : 4102002.3305
No. Publikasi : 33050.24006
Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman : viii + 54 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen

Gambar Sampul:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen

Diterbitkan oleh:

©BPS Kabupaten Kebumen

Sumber Ilustrasi/Foto:

canva.com

*“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil
tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.”*

TIM PENYUSUN

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN KEBUMEN 2023

Volume 8, 2024

Pengarah

Kus Haryono, S.ST., M.Si.

Penanggung Jawab

Peni Dwi Wahyu Winarsi, S.Stat.

Penyunting

Desilia Wimbi Susanti, S.ST., M.Stat.

Penulis Naskah

Dwi Agus Styawan, S.Si. M.Sc.

Kata Pengantar

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator capaian pembangunan kualitas hidup masyarakat yang disusun berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Angka IPM yang disajikan secara periodik setiap tahun bertujuan untuk mengetahui capaian pembangunan manusia di Kebumen, baik dari sisi capaian IPM secara umum maupun dimensi-dimensi penyusunnya.

IPM Kabupaten Kebumen tahun 2023 telah mencapai 71,88. Dengan capaian IPM tersebut, Kebumen berada pada posisi status pembangunan manusia kategori 'tinggi'. Capaian tersebut mengantarkan Kebumen pada posisi 23 dari 35 kabupaten/kota dalam pencapaian pembangunan manusia di Jawa Tengah. Pencapaian dan kemajuan tersebut, menyisakan pekerjaan dan tugas yang tidak ringan, terutama terkait dengan dimensi standar hidup layak.

Semoga publikasi ini dapat memberikan gambaran terkait dengan pembangunan manusia di Kebumen. Publikasi ini diharapkan juga dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam melaksanakan perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan manusia di Kebumen pada masa mendatang.

Kebumen, Mei 2024
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Kebumen



Kus Haryono, S.ST., M.Si.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENGUKURAN PEMBANGUNAN MANUSIA	3
1.1. Perkembangan Pengukuran Pembangunan.....	3
1.2. Pembangunan Manusia sebagai Perluasan Pilihan.....	5
1.3. Perkembangan Pengukuran Pembangunan Manusia.....	8
1.4. Dimensi dan Indikator Pembangunan Manusia.....	11
BAB II. CAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA	17
2.1. Pandemi dan Pembangunan Manusia	17
2.1. Capaian Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat	18
2.1. Capaian Dimensi Pengetahuan	20
2.1. Capaian Dimensi Standar Hidup Layak	22
BAB III. PERBANDINGAN IPM KEBUMEN	27
3.1. Perbandingan IPM Kebumen dengan Jawa Tengah dan Indonesia.....	27
3.2. Perbandingan IPM Kebumen dengan Kabupaten/Kota Sekitar.....	32
BAB IV. KESIMPULAN	41
REFERENSI	45



<https://kebumenkab.bps.go.id>

Pengukuran
Pembangunan Manusia

BAB I

PENGUKURAN PEMBANGUNAN MANUSIA

1.1. Perkembangan Pengukuran Pembangunan

Todaro dan Smith (2003) pada era sebelum 1970, menyatakan bahwa paradigma pembangunan hanya dipandang sebagai fenomena ekonomi. Pada saat itu perhatian dunia tertuju pada aspek pendapatan, modal, pertumbuhan ekonomi, dan berbagai aspek lain terkait dengan ekonomi. Akan tetapi seiring dengan waktu berjalan terdapat suatu paradoks, yakni munculnya berbagai fenomena sosial yang justru bertolak belakang dengan fenomena ekonomi. Data empiris menunjukkan bahwa beberapa negara yang mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi ternyata juga mengalami beberapa persoalan sosial, seperti pengangguran, kemiskinan, dan masalah sosial lain. Hal ini menyadarkan berbagai pihak bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan penduduk wilayah tersebut.

Keberadaan paradoks sosial-ekonomi tersebut disebabkan oleh dua hal. Pertama, nilai pendapatan nasional yang bermanfaat untuk banyak tujuan tidak mengungkap penerima manfaatnya. Kedua, penilaian kinerja yang hanya berdasarkan pada pendapatan nasional sering menimbulkan penafsiran yang keliru. Hal ini disebabkan oleh adanya aspek penting lain yang tidak tergambar oleh indikator tersebut. Aspek-aspek lain tersebut diantaranya adalah akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, akses yang lebih besar terhadap pengetahuan, mata pencaharian yang lebih aman, pekerjaan yang lebih baik, keamanan dari tindak kejahatan dan kekerasan fisik, waktu senggang yang memuaskan, dan perasaan berperan aktif dalam kegiatan sosial, ekonomi, budaya, dan politik.

Konsep pembangunan yang cenderung kurang komprehensif dengan hanya berfokus pada aspek ekonomi melahirkan perspektif baru dalam pembangunan. Konsep pembangunan manusia yang baru bertujuan untuk memperbaiki kekurangan tersebut dengan melihat pembangunan secara lebih komprehensif. Konsep pembangunan manusia tidak hanya berdasarkan pada aspek pendapatan, tetapi juga berdasarkan aspek kesehatan dan pendidikan.

Konsep pembangunan manusia pertama kali dikemukakan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada 1990 melalui laporan yang berjudul *Human Development Report*. UNDP dalam laporan tersebut menyatakan bahwa manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya, sehingga pembangunan manusia harus menempatkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan, bukan hanya sebagai input pembangunan. Oleh karena itu, dalam perspektif pembangunan manusia, tujuan pembangunan pada dasarnya adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk menikmati umur panjang, hidup sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (UNDP, 1990).

Gagasan pembangunan manusia yang dikemukakan oleh UNDP pada 1990 memberikan paradigma baru tentang bagaimana melihat pembangunan. Paradigma pembangunan manusia berbeda dengan pendekatan pembangunan konvensional seperti pertumbuhan ekonomi, pembentukan modal manusia, pengembangan sumber daya manusia, kesejahteraan masyarakat atau kebutuhan dasar manusia. Perbedaan cara pandang pendekatan tersebut antara lain sebagai berikut.

- Pertumbuhan ekonomi adalah hal yang diperlukan dalam pembangunan manusia. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup dalam meningkatkan kesejahteraan manusia. Kemajuan manusia dalam masyarakat mungkin saja masih rendah meskipun Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan per kapita tumbuh tinggi, dan sebaliknya.

- Teori pembentukan modal manusia dan pengembangan sumber daya manusia memandang manusia sebagai alat dan bukan sebagai tujuan. Kedua pendekatan tersebut berfokus pada sisi penawaran yang memandang manusia sebagai sumber daya untuk menghasilkan produksi. Akan tetapi, manusia sebenarnya memiliki nilai yang lebih dari sekadar barang modal kegiatan produksi. Manusia juga merupakan tujuan akhir dan penerima manfaat dari proses ini.
- Pendekatan kesejahteraan masyarakat lebih memandang manusia sebagai penerima manfaat dari proses pembangunan daripada sebagai agen di dalamnya. Pendekatan ini lebih menekankan kebijakan distribusi daripada struktur produksi.
- Pendekatan kebutuhan dasar berfokus pada kelompok barang dan jasa yang dibutuhkan oleh suatu kelompok masyarakat, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, perawatan kesehatan, dan air. Pendekatan ini berfokus pada penyediaan barang dan jasa dibandingkan masalah pilihan manusia.

1.2. Pembangunan Manusia sebagai Perluasan Pilihan

Gagasan tentang pembangunan manusia merupakan manifestasi dari konsep kapabilitas yang dikemukakan oleh Amartya Sen. Menurut Sen (2003), kapabilitas merupakan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang dianggap bernilai. Hal yang mendasar bagi hidup manusia pada dasarnya adalah kemampuan. Sen menyebut konsep ini dalam beberapa terminologi, yaitu kesempatan, daya, dan juga sebagai kebebasan. Kapabilitas seseorang merupakan kombinasi dari berbagai kesempatan yang bisa diperoleh manusia untuk menjalankan fungsi dalam hidupnya. Dengan kata lain, kapabilitas adalah sebuah bentuk kebebasan untuk mencapai berbagai pilihan dalam menjalankan fungsi hidup.

Untuk memahami konsep kapabilitas, Sen memberikan contoh analisisnya pada kasus orang yang berpuasa dan orang kelaparan. Seseorang yang berpuasa misalnya, orang tersebut menjalani situasi yang hampir sama untuk hidup seperti mereka yang miskin dan terpaksa lapar, dalam hal jumlah makanan atau gizi yang mereka konsumsi. Akan tetapi mereka memiliki 'perangkat kapabilitas' (*capability set*) lebih besar dibanding mereka yang miskin karena kelompok pertama dapat memilih makan lebih enak sedangkan yang kedua tidak. Terdapat perbedaan yang jelas diantara mereka, yakni yang berpuasa mengalami lapar karena pilihan atau kehendaknya sendiri sedangkan yang benar-benar menderita kelaparan tidak memiliki pilihan.

Sen (2003) membagi konsep kapabilitas menjadi dua, yaitu *well-being freedom* dan *agency freedom*. *Well-being freedom* merupakan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang sangat menentukan kesejahteraan seseorang. Sementara *agency freedom* adalah kemampuan seseorang melakukan atau mencapai sesuatu yang dianggap bernilai.

Dalam konteks pembangunan, Sen melihat kapabilitas sebagai elemen paling mendasar dalam hidup manusia karena terkait dengan kemampuan meraih kehidupan yang dianggap bernilai. Pendekatan kapabilitas fokus pada persoalan bagaimana individu memiliki kemampuan melakukan sesuatu. Pendekatan ini juga fokus pada kemampuan manusia memilih melakukan hal-hal penting untuk meningkatkan kesejahtraannya, bukan hanya pada persoalan seberapa banyak harta kekayaan atau pendapatan yang dimiliki. Dengan demikian, kapabilitas mengacu pada kemungkinan individu untuk merealisasikan dirinya, yaitu memilih yang penting untuk kesejahtraannya. Kapabilitas juga mengacu pada hal-hal yang harus dibangun, bukan hanya dimensi kesejahteraan, tetapi juga kebebasan sipil dan politik, seperti kebebasan berpartisipasi dalam politik, kebebasan berpendapat, dan lain-lain.

Dengan konsep kapabilitas, Sen berpendapat bahwa ada tiga aspek yang terkait dengan pembangunan, yaitu sebagai berikut:

1. Keberfungsian (*functionings*) adalah suatu keadaan *doing and being* seperti dipelihara dengan baik, terlindungi, cukup makan, dan bebas dari malaria. Hal tersebut harus dapat dibedakan dengan komoditas yang digunakan untuk mencapainya.
2. Kemampuan (*capabilities*) mengacu pada serangkaian fungsi berharga yang dimiliki seseorang. Kemampuan seseorang mewakili kebebasan individu untuk memilih antara kombinasi fungsi berbeda yang dimilikinya untuk alasan yang dianggap bernilai.
3. Sumber daya (*resources*) yang merupakan input dan nilainya tergantung pada kemampuan untuk mengubah sumber daya menjadi fungsi yang berharga.

Sen menggunakan contoh seseorang yang bersepeda untuk menggambarkan aspek terkait pembangunan. Agar dapat bersepeda (*functioning*), seseorang harus memiliki sepeda (*resource*). Namun, orang tersebut juga harus memiliki kemampuan untuk mengubah sepeda menjadi sesuatu yang berfungsi. Bersepeda terkait dengan kemampuan seseorang dalam hal fisiologi dan kesejahteraan pribadi (seperti kesehatan), norma sosial, dan lingkungan fisik (seperti kualitas jalan). Dengan konsep tersebut, Sen mendefinisikan pembangunan manusia sebagai perluasan kebebasan yang dinikmati oleh manusia. Kebebasan terkait dengan berbagai faktor sosial ekonomi seperti akses pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan politik.

Selain Sen, Mahbub ul Haq juga menjadi tokoh penting yang berperan dalam memformulasikan paradigma pembangunan manusia. Haq (1995) melihat semakin banyak bukti yang tidak mendukung keyakinan awal tentang kekuatan *trickle down* kekuatan pasar untuk memberikan manfaat ekonomi yang merata dan menghapuskan kemiskinan. Mahbub ul Haq mengartikan

pembangunan manusia dengan konsep pilihan manusia (*people choices*). Mahbub ul Haq berpendapat bahwa pembangunan manusia merupakan proses perluasan pilihan yaitu kebebasan berpolitik, partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, pilihan untuk berpendidikan, bertahan hidup dan sehat, menikmati standar hidup layak, serta berpartisipasi dalam kehidupan komunitas serta dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia dilihat sebagai ruang pilihan-pilihan, sebagaimana manusia memiliki berbagai potensi dalam dirinya untuk menentukan pilihan. Konsep kapabilitas yang dikemukakan oleh Sen dan konsep pilihan manusia yang dikemukakan oleh Haq menjadi dasar dalam paradigma pembangunan manusia yang diimplementasikan oleh UNDP. Berdasarkan konsep tersebut, UNDP mendefinisikan pembangunan manusia sebagai proses perluasan pilihan manusia (*enlarging the people choices*).

1.3. Perkembangan Pengukuran Pembangunan Manusia

UNDP menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketika IPM pertama kali dirilis, ketiga dimensi tersebut diwakili dengan tiga indikator dalam penghitungan, yaitu Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), Angka Melek Huruf (AMH), dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Metode agregasi yang dilakukan untuk menghitung IPM menggunakan rata-rata aritmetik.

Untuk memenuhi tuntutan perkembangan, UNDP melakukan penyempurnaan terhadap penghitungan IPM. UNDP tercatat telah lima kali melakukan penyempurnaan sejak kali pertama dirilis. Tahun 2010, UNDP melakukan perubahan yang cukup signifikan terhadap penghitungan IPM dengan tetap mempertahankan tiga dimensi yang sama tetapi mengubah indikator yang digunakan. Agregasi Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) diubah menjadi agregasi Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Sementara itu, PDB per kapita diubah menjadi angka Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Selain perubahan pada indikator, UNDP juga mengubah penghitungan agregasi IPM dari rata-rata aritmetik menjadi rata-rata geometrik.



Gambar 1.1. Perkembangan Metodologi IPM

Perubahan metodologi penghitungan IPM didasarkan pada alasan bahwa suatu indeks komposit harus mampu mengukur apa yang diukur. Dengan pemilihan metode dan variabel yang tepat, indeks yang dihasilkan akan relevan. Selain itu, terdapat dua hal mendasar yang menjadi alasan utama perubahan metodologi penghitungan IPM. Pertama, beberapa indikator sudah tidak tepat lagi digunakan dalam penghitungan IPM. Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan lagi menjadi indikator perkembangan pendidikan karena kurang menggambarkan kualitas pendidikan.

Sebelum revisi penghitungan pada tahun 2010, AMH di sebagian besar negara sudah tinggi sehingga tidak mampu membedakan tingkat pendidikan antarnegara dengan baik. Dalam konsep pembentukan indeks komposit, indikator yang tidak sensitif dalam membedakan akan menyebabkan indeks komposit menjadi tidak relevan. Dengan pertimbangan tersebut, indikator AMH perlu diganti dengan indikator lain yang representatif. Penggunaan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah dapat memberikan gambaran yang lebih relevan tentang dimensi pendidikan dan perubahannya.

Indikator berikutnya yang diganti adalah PDB per kapita. Indikator ini pada dasarnya merupakan pendekatan terhadap pendapatan masyarakat. Namun, konsep mendasar dalam penghitungan adalah PDB diciptakan dari seluruh faktor produksi yang menyertakan tenaga kerja dan investasi dari dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, PDB per kapita kurang dapat menggambarkan pendapatan masyarakat. Penggunaan PNB yang menggantikan PDB dapat lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah, karena hanya memperhitungkan faktor produksi yang menyertakan tenaga kerja dan investasi dari dalam negeri.

Kedua, penggunaan rata-rata aritmetik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah pada suatu dimensi tertutupi oleh capaian yang tinggi dari dimensi lain. Sementara itu, konsep mendasar dalam pembangunan manusia adalah pemerataan dimensi dan menghindari ketimpangan antardimensi. Penggunaan rata-rata aritmetik memungkinkan adanya transfer penilaian dalam capaian dari dimensi dengan capaian tinggi ke dimensi dengan capaian rendah, sehingga perlu diganti dengan rata-rata geometrik. Penggunaan rata-rata geometrik tidak serta merta dapat menutupi kekurangan pada suatu dimensi dengan dimensi lain yang unggul. Dengan kata lain, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang merata diperlukan keseimbangan antardimensi yang sama pentingnya.

Sejalan dengan konsep pembangunan manusia yang dipromosikan oleh UNDP, Indonesia mulai melakukan penghitungan IPM pada tahun 1996. Saat itu IPM dihitung secara berkala setiap tiga tahun di tingkat nasional dan provinsi. Pada tahun 1999, Indonesia menghitung IPM sampai dengan tingkat kabupaten/kota dan dilakukan untuk periode data 1996 dan 1999, kemudian dilanjutkan lagi pada tahun 2002 untuk data 2002. Sejak tahun 2004, IPM dihitung secara berkala setiap tahun sampai dengan level kabupaten/kota untuk memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan, terutama dalam penentuan besaran Dana Alokasi Umum (DAU). Sejak tahun data 2014, Indonesia

mengaplikasikan metode penghitungan IPM yang diperbarui UNDP pada tahun 2010 dan untuk memenuhi ketersediaan data tahun sebelumnya dilakukan *backasting* untuk periode data 2010 – 2013.

1.4. Dimensi dan Indikator Pembangunan Manusia

Sejak kali pertama dirilis IPM pada tahun 1990, UNDP menggunakan tiga dimensi pembentuk IPM. Ketiga dimensi ini merupakan pendekatan yang dipilih dalam penggambaran kualitas hidup manusia dan tidak mengalami perubahan hingga saat ini. Dimensi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*).
2. Pengetahuan (*knowledge*).
3. Standar hidup layak (*decent standard of living*).

Penghitungan IPM yang dilakukan di Kebumen mengacu pada ketiga dimensi tersebut. Ketika UNDP melakukan perubahan dan penyempurnaan metode penghitungan IPM, Kebumen juga turut mengadopsi metode tersebut dengan mengacu pada penyempurnaan yang dilakukan oleh UNDP. Penghitungan yang dilakukan sejak 2015 hingga saat ini mengadopsi metodologi yang direvisi UNDP pada 2014.

UNDP menggunakan data Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita sebagai indikator pada dimensi standar hidup layak. Akan tetapi, data tersebut tidak tersedia di tingkat daerah sehingga digunakan indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan sebagai alternatif. Indikator ini dapat dihitung hingga tingkat kabupaten/kota. Indikator pengeluaran riil per kapita juga mampu mencerminkan indikator pendapatan masyarakat dan menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai output dari kegiatan ekonomi.

Dimensi umur panjang dan hidup sehat direpresentasikan oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Penggunaan umur harapan hidup sebagai indikator didasari oleh kepercayaan umum bahwa umur panjang merupakan hal

yang berharga dan kenyataan bahwa terdapat berbagai faktor yang berkaitan erat dengan umur harapan hidup, seperti nutrisi yang cukup dan kesehatan yang baik.

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) merupakan rata-rata perkiraan lamanya waktu (dalam tahun) yang dapat dijalani oleh seseorang selama hidupnya. Penghitungan UHH dilakukan melalui pendekatan tidak langsung (*indirect estimation*). Standardisasi nilai UHH dilakukan dengan konversi menjadi indeks harapan hidup yang dihitung berdasarkan nilai maksimum dan minimum UHH yang sesuai dengan standar UNDP, yaitu 85 tahun untuk nilai maksimum dan 20 tahun untuk nilai minimum.

Indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) tidak mengalami perubahan pada metode baru ini, akan tetapi sumber data yang digunakan dalam penghitungan indikator ini telah diperbarui dengan menggunakan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010). Sumber data yang digunakan dalam penghitungan indikator ini menjadi penting untuk melihat derajat kesehatan suatu masyarakat. Indikator ini tetap dipertahankan karena relevansinya serta ketersediaannya hingga tingkat kabupaten/kota.

Pada tahun 2023 hasil SP2010 tidak lagi digunakan dalam penghitungan indikator UHH. Pelaksanaan *Long Form* Sensus Penduduk 2020 (LF SP2020) telah menghasilkan parameter-parameter demografi yang baru sehingga penghitungan indikator UHH pada tahun 2023 sudah menggunakan hasil LF SP2020. Tidak hanya tahun 2023, hasil LF SP2020 ini juga digunakan untuk menghitung indikator UHH tahun 2020 sampai tahun 2022. Dengan demikian indikator UHH tahun 2020-2023 terdapat dua angka yaitu indikator UHH berdasarkan hasil SP2010 dan indikator UHH berdasarkan hasil LF SP2020. Hal ini menyebabkan angka IPM tahun 2020-2023 juga memiliki dua angka.

Dimensi pengetahuan direpresentasikan oleh Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator tersebut merefleksikan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan, khususnya pendidikan

formal. HLS menggambarkan kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal, sedangkan RLS menggambarkan stok modal manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah.

Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak yang berumur 7 tahun, sementara rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menempuh pendidikan formal. Penghitungan indeks pendidikan didasarkan pada rata-rata indeks HLS dan indeks RLS dengan bobot yang sama. Adapun dalam penghitungan indeks HLS dan RLS digunakan batasan nilai maksimum dan minimum yang sama dengan standar UNDP. Nilai maksimum dan minimum untuk HLS masing-masing 18 tahun dan 0 tahun, sementara nilai maksimum dan minimum untuk RLS masing-masing 15 tahun dan 0 tahun. Sumber data yang digunakan untuk menghitung indikator HLS dan RLS adalah hasil Susenas bulan Maret serta data jumlah siswa yang menjalani pendidikan dengan bermukim dari Kementerian Agama dan hasil inventarisasi data sektoral di daerah.

1.4. Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indikator yang penting untuk melihat pembangunan dari sisi manusia. Setiap indikator komponen penghitungan IPM dapat dimanfaatkan untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. Secara kontekstual, perkembangan IPM menunjukkan perubahan pilihan-pilihan masyarakat untuk menjalani kehidupan yang bernilai.

Dalam konteks pengambilan kebijakan, IPM merupakan salah satu indikator target pembangunan dalam pembahasan asumsi makro pemerintah dan DPR. IPM bersama dengan indikator pertumbuhan ekonomi, PDB per kapita, pertumbuhan investasi, kemiskinan, rasio gini, inflasi, dan pengangguran juga menjadi indikator penting dalam Kerangka Ekonomi Makro (KEM).

Pemerintah terus mengevaluasi kemajuan KEM untuk memastikan arah pembangunan berjalan sesuai koridor yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Sementara itu, dalam konteks penganggaran pembangunan, IPM digunakan sebagai salah satu variabel dalam penentuan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU). Selain IPM, variabel lain yang digunakan dalam penentuan DAU adalah jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. DAU merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dalam mendanai pembangunan daerah.

Selain sebagai salah satu variabel penentuan DAU, komponen IPM (HLS, RLS, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan) merupakan indikator yang digunakan dalam penghitungan Dana Insentif Daerah (DID). DID merupakan salah satu instrument pemerintah dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. DID adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.



<https://kebumenkab.bps.go.id>

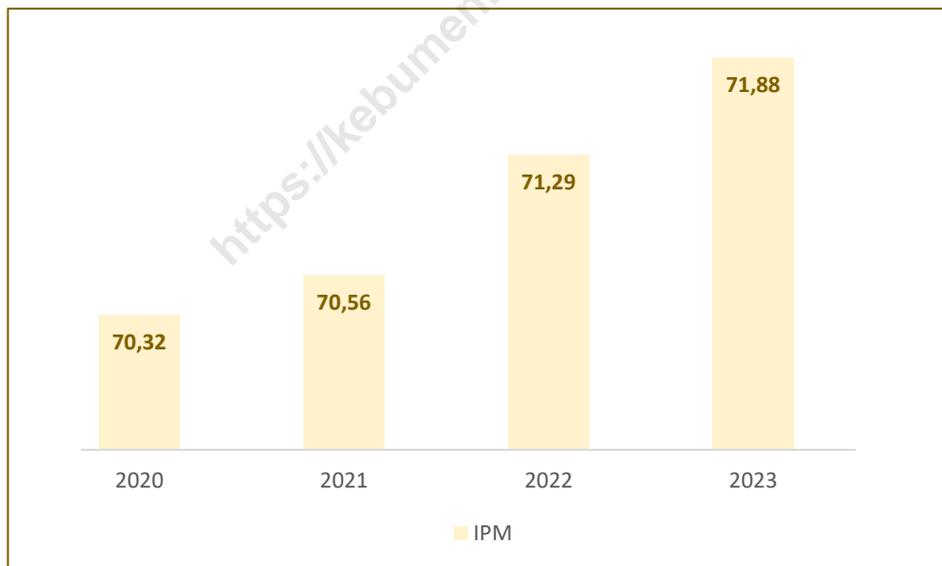
Capaian
Pembangunan Manusia

BAB II.

CAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA

2.1. Pandemi dan Pembangunan Manusia

Dari tahun ke tahun, IPM Kebumen selalu meningkat, bahkan sebelum pandemi COVID-19 pertumbuhannya selalu di atas 0,60 persen. Pada masa pandemi COVID-19, IPM Kebumen masih meningkat menjadi 70,32 pada 2020, kemudian kembali meningkat menjadi 70,56 pada 2021 (Gambar 2.1). Berbagai upaya pemulihan sosial-ekonomi pasca pandemi, khususnya di Kabupaten Kebumen mulai membuahkan hasil. Hal ini tercermin dari peningkatan IPM yang cukup signifikan hingga menjadi 71,88 pada 2023. Dengan capaian ini, Kebumen berada pada posisi status pembangunan manusia kategori 'tinggi'.



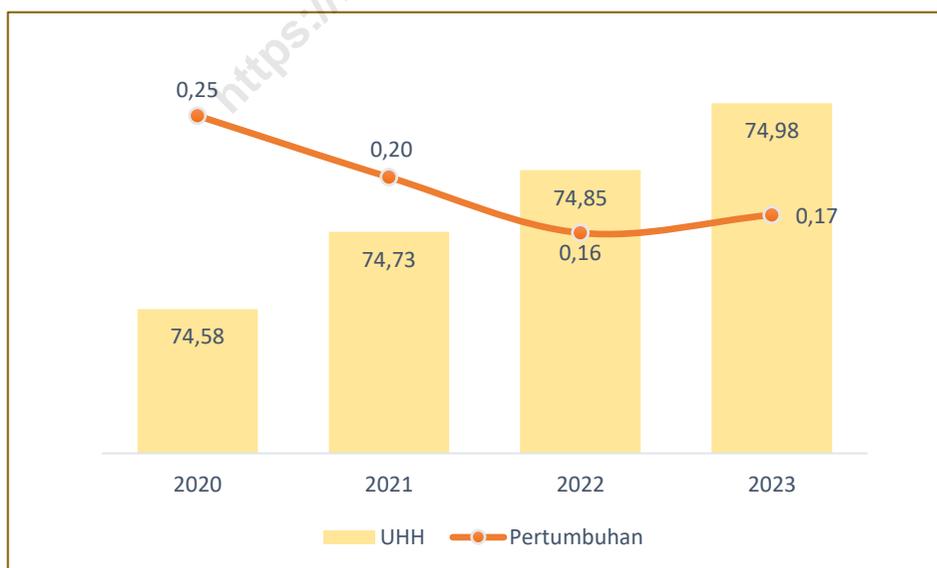
Gambar 2.1. Capaian IPM Kabupaten Kebumen, 2020 – 2023

Dalam perspektif pertumbuhan, pada 2021, IPM Kebumen hanya tumbuh sebesar 0,34 persen. Kondisi ini seiring dengan masih diberlakukannya pembatasan kegiatan di beberapa sektor sebagai imbas Pandemi Covid-19.

Memasuki tahun 2022, seluruh dunia mulai beradaptasi dengan kondisi pandemi yang ada. Dimulai dengan penggalakan vaksinasi serta berbagai pengenalan kebiasaan baru yang terdiri dari pengetatan protokol kesehatan hingga penerapan *work from home* untuk penduduk bekerja dan *school from home* untuk penduduk yang masih berada di bangku sekolah. Seiring dengan penyebaran COVID-19 yang semakin terkendali dan kegiatan ekonomi yang mulai pulih, IPM Kebumen mengalami perbaikan dan tumbuh lebih cepat pada 2022, yaitu sebesar 1,03 persen dan terus tumbuh, walaupun melambat, sebesar 0,83 persen pada 2023.

2.2. Capaian Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan harapan hidup saat lahir. Harapan hidup saat lahir menunjukkan derajat kesehatan suatu negara. Semakin tinggi harapan hidup saat lahir suatu negara, semakin tinggi pula derajat kesehatan suatu negara (Jen et al, 2010).



Gambar 2.2. Capaian dan Pertumbuhan UHH Kabupaten Kebumen, 2020 – 2023

Selama periode 2020 – 2023, capaian dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat. Harapan hidup saat lahir Kebumen tahun 2023 adalah 74,98 tahun. Hal ini berarti anak yang baru lahir pada tahun 2023 diharapkan dapat hidup hingga mendekati 75 tahun.

Walaupun capaian UHH selama 2020 – 2023 terus meningkat, tetapi pertumbuhan capaian dimensi ini cenderung mengalami perlambatan. Pada 2020, UHH Kabupaten Kebumen mampu tumbuh sebesar 0,25 persen, kemudian pada periode berikutnya terus melambat hingga pada 2023 tercatat tumbuh 0,17 persen.

Perlambatan capaian dimensi umur panjang dan hidup sehat ini tidak lepas dari pandemi COVID-19. Pandemi secara tidak langsung mempengaruhi seluruh capaian dimensi pembangunan manusia, termasuk dimensi umur panjang dan hidup sehat. Periode pasca pandemi, harapan hidup saat lahir relatif masih belum pulih dari tekanan. Hal ini terlihat dari capaian UHH yang terus meningkat tapi pertumbuhannya melambat.



Gambar 2.3. Morbiditas Kabupaten Kebumen, 2017 – 2023

Banyak faktor yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan capaian UHH, baik dari faktor internal sektor kesehatan maupun faktor eksternal. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Blum (1974), bahwa derajat kesehatan penduduk suatu negara dapat diukur dari angka kematian (mortalitas) dan angka kesakitan (morbidity). Angka morbidity di Kebumen sebelum pandemi terus menunjukkan tren peningkatan, yakni dari 12,91 pada 2017 menjadi 20,18 pada 2019 (Gambar 2.3). Pada awal pandemi yakni tahun 2020, morbidity Kebumen semakin meningkat menjadi 21,52. Walaupun pada 2021, angka kesakitan sempat menurun menjadi 14,24 persen, tetapi pada tahun-tahun berikutnya kembali meningkat menjadi sekitar 22 – 23 persen.

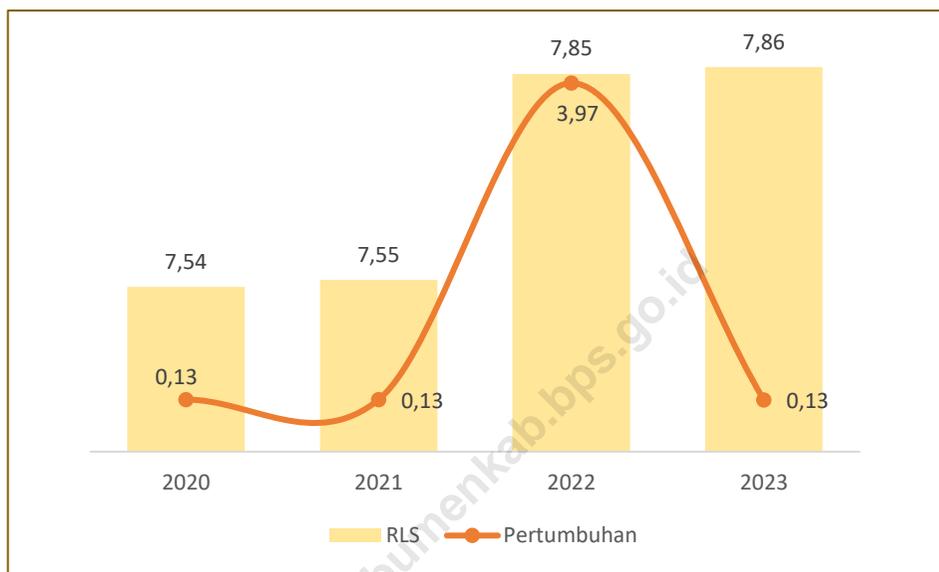
Jaba et al. (2014) menyebutkan bahwa derajat kesehatan suatu populasi merupakan dampak dari sistem kesehatan serta sumber daya yang ada di wilayah tersebut. Sumber daya dalam sistem kesehatan yang memiliki peran penting dalam derajat kesehatan suatu populasi adalah jumlah dokter, lama rawat inap, tingkat imunisasi, level edukasi, dan teknologi (Mohan et al., 2007). Selain itu, pengeluaran per kapita sebulan untuk kesehatan juga erat kaitannya dengan derajat kesehatan penduduk (Jaba et al., 2014).

2.1. Capaian Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan dalam pembentukan IPM disusun dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah yang dicakup adalah rata-rata lamanya waktu yang digunakan oleh penduduk berumur 25 tahun ke atas untuk menjalani pendidikan formal, sedangkan harapan lama sekolah adalah jumlah tahun yang diharapkan akan dijalani individu berusia 7 tahun untuk menempuh pendidikan.

Secara umum, kedua indikator ini memiliki tren meningkat dalam empat tahun terakhir. Rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas pada tahun 2023 di Kebumen yaitu 7,86 tahun. Angka ini dapat diinterpretasikan bahwa secara rata-rata, penduduk berusia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan

pendidikan hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas VIII. Capaian ini relatif stagnan jika dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 7,85 tahun (Gambar 2.4).

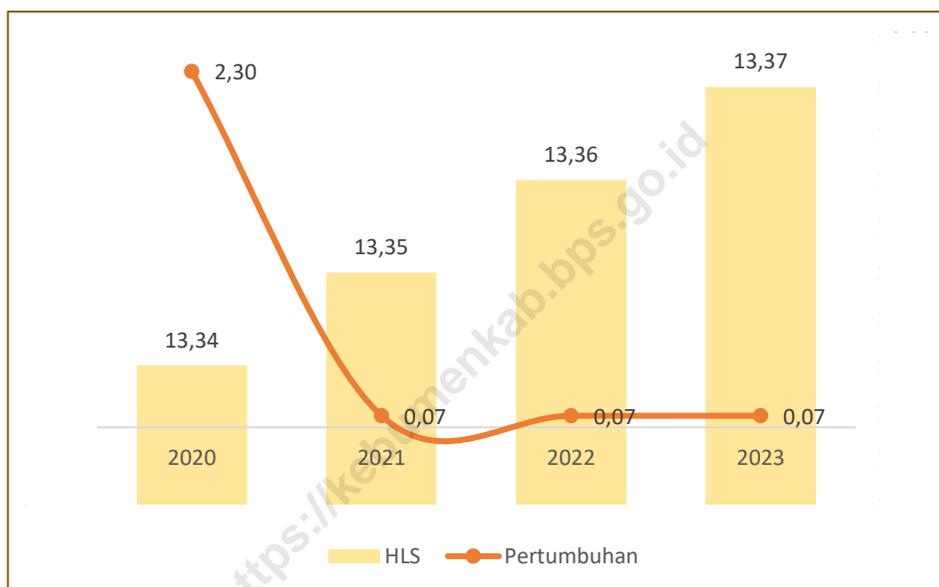


Gambar 2.4. Capaian dan Pertumbuhan RLS Kabupaten Kebumen, 2020 – 2023

Harapan lama sekolah Kebumen pada tahun 2023 yaitu 13,37 tahun. Hal ini berarti penduduk usia 7 tahun ke atas diharapkan dapat menyelesaikan pendidikan hingga level perguruan tinggi tahun pertama dengan kondisi aksesibilitas pendidikan yang stagnan atau tidak ada perubahan yang berarti. Harapan lama sekolah tahun 2023 meningkat 0,01 tahun dari tahun 2022 (Gambar 2.5).

Capaian kedua indikator ini tak lepas dari pengaruh pandemi. Meskipun kedua indikator dalam dimensi pengetahuan mengalami peningkatan, indikator rata-rata lama sekolah melambat pada dua tahun pertama pandemi (2020 dan 2021). Indikator rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebelum pandemi melanda. Namun pandemi berdampak pada melambatnya pertumbuhan rata-rata lama sekolah sebesar 0,13 persen pada

tahun 2020 dan 2021. Berbagai upaya pemulihan sosial ekonomi mulai membuahkan hasil, termasuk pada sektor pendidikan. Hal ini tercermin dari rata-rata lama sekolah yang tercatat tumbuh positif sebesar 3,97 persen pada tahun 2022, walaupun kemudian kembali tumbuh melambat 0,13 persen pada tahun 2023.



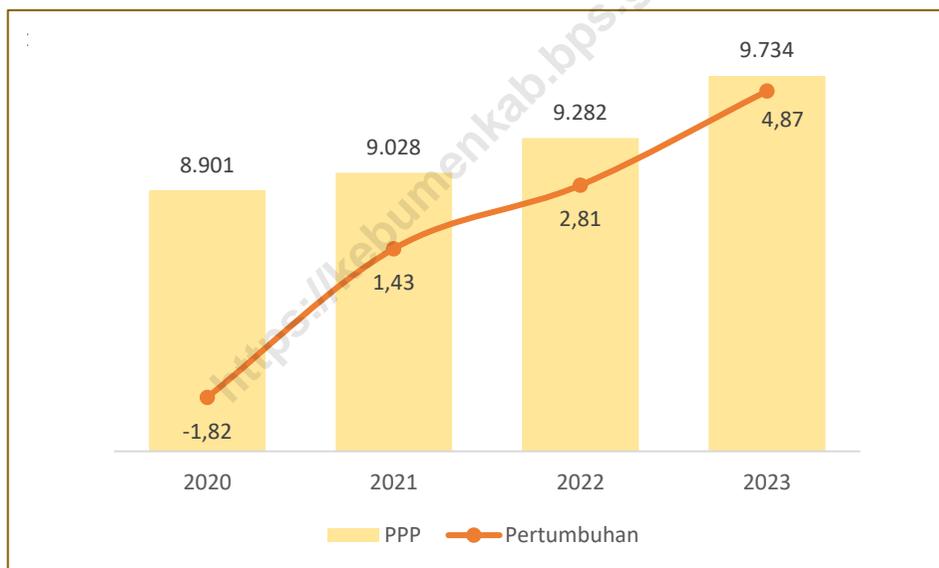
Gambar 2.5. Capaian dan Pertumbuhan HLS Kabupaten Kebumen, 2020 – 2023

Lain halnya dengan indikator rata-rata lama sekolah, indikator harapan lama sekolah justru relatif tidak berdampak pada awal pandemi. Harapan lama sekolah justru tumbuh positif sebesar 2,30 persen pada 2020. Dampak pandemi COVID-19 justru mulai dirasakan setelah pandemi. Pada tahun 2021, harapan lama sekolah tumbuh melambat sebesar 0,07 persen, kemudian pada periode berikutnya (2022 – 2023) pertumbuhannya cenderung stagnan.

2.1. Capaian Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi terakhir pembentuk IPM adalah dimensi standar hidup layak yang diwakili oleh indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan.

Indikator ini menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat selama periode tertentu. Capaian indikator ini memiliki tren meningkat sebelum pandemi COVID-19 menyebar. Untuk kali pertama sejak metode baru penghitungan IPM diadopsi, pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan pada tahun 2020 turun menjadi 8,9 juta rupiah per kapita per tahun. Pada periode 2021 – 2023, capaian indikator ini mulai mengalami pemulihan. Pada tahun 2021, pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan meningkat menjadi 9,03 juta rupiah per kapita per tahun, dan terus meningkat menjadi 9,73 juta rupiah per kapita per tahun pada 2023.



Gambar 2.6. Capaian dan Pertumbuhan PPP Kabupaten Kebumen, 2020 – 2023

Pertumbuhan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan pada tahun 2023 yaitu sebesar 4,87 persen. Pencapaian ini relatif tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan periode sebelumnya. Capaian ini mengindikasikan mulai pulihnya perekonomian Kebumen pasca Pandemi COVID-19.

Perbandingan IPM Kebumen

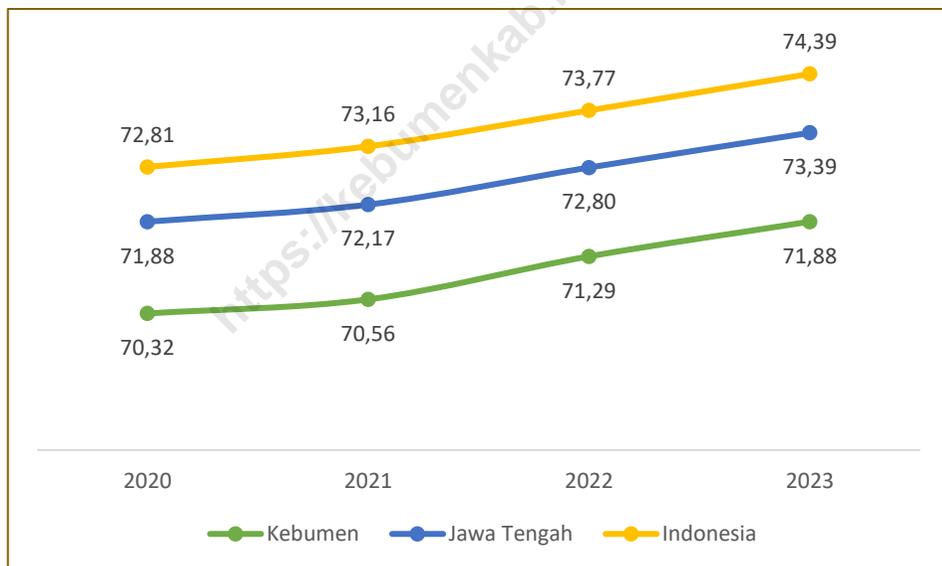


BAB III.

PERBANDINGAN IPM KEBUMEN

3.1. Perbandingan IPM Kebumen dengan Jawa Tengah dan Indonesia

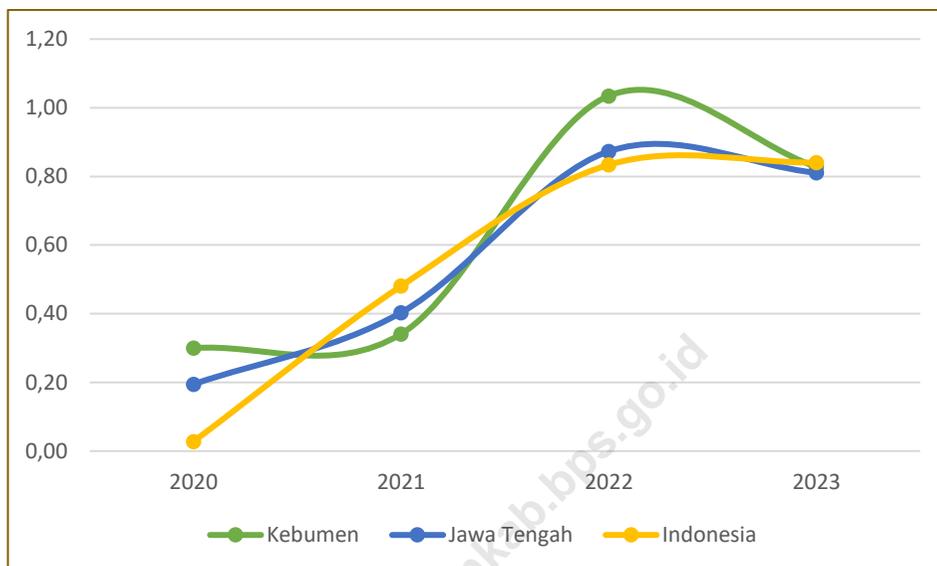
Keberagaman potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia antardaerah menyebabkan capaian pembangunan manusia berbeda pada setiap wilayah. Keberhasilan program-program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah juga menentukan tinggi rendahnya capaian pembangunan manusia dalam suatu wilayah. Selain itu, diperlukan juga upaya pengawasan dan evaluasi terhadap program-program pembangunan untuk mempercepat peningkatan pembangunan manusia.



Gambar 3.1. IPM Kebumen, Jawa Tengah, dan Indonesia, 2020 – 2023

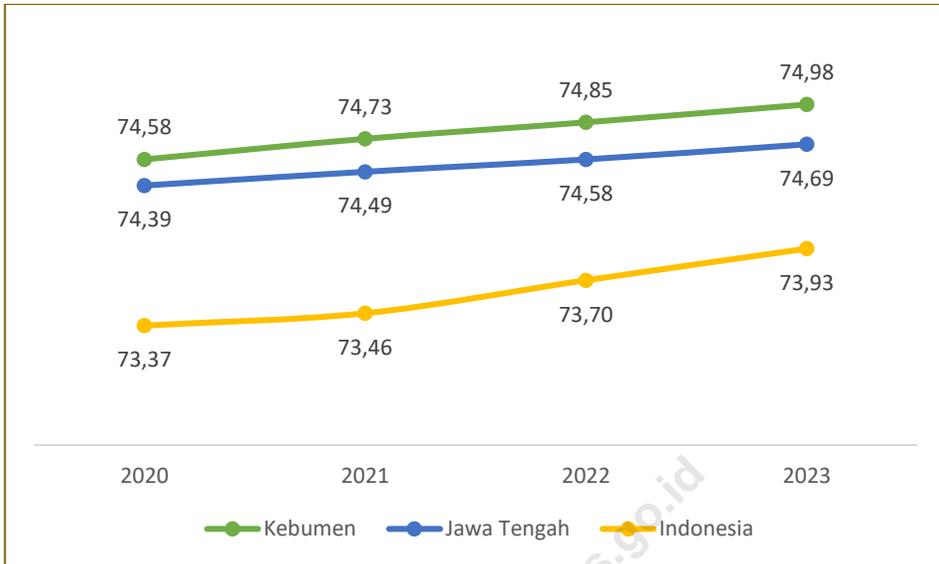
Selama 2020 – 2023, IPM Kebumen terus meningkat dari 70,32 menjadi 71,88, meskipun masih dibawah IPM Jawa Tengah dan Indonesia. Hal yang menarik, berdasarkan Gambar 3.1, adalah IPM Kebumen menunjukkan tren yang positif. Hal ini terlihat dari semakin menyempitnya jarak antara capaian IPM Kebumen dengan Jawa Tengah dan Indonesia. Potret ini menunjukkan

bahwa kebijakan-kebijakan pembangunan di Kebumen telah berada pada jalur yang tepat, khususnya dalam pembangunan manusia.



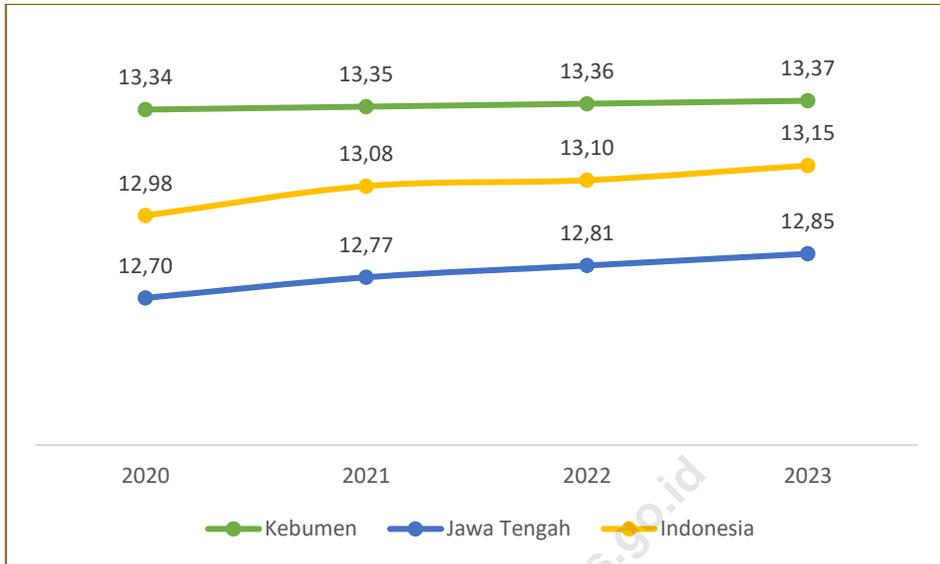
Gambar 3.2. Pertumbuhan IPM Kebumen, Jawa Tengah, dan Indonesia, 2020 – 2023

Secara umum selama 2020 – 2023, pertumbuhan IPM Kebumen rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Indonesia. Bahkan ketika awal pandemi tahun 2020, IPM Kebumen tetap mampu tumbuh lebih cepat, yakni 0,30 persen. Adapun Jawa Tengah dan Indonesia masing-masing hanya tumbuh sebesar 0,19 persen dan 0,03 persen. Dampak pandemi di Kebumen mulai dirasakan pada 2021. Hal ini terlihat dari IPM Kebumen yang tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Indonesia. Akan tetapi pada 2022, IPM Kebumen tumbuh jauh lebih cepat yakni 1,03 persen, sedangkan Jawa Tengah dan Indonesia masing-masing hanya tumbuh 0,87 persen dan 0,83 persen. Pertumbuhan ini relatif tertahan pada 2023, baik Kebumen, Jawa Tengah, maupun Indonesia mencatat pertumbuhan yang relatif sama yakni sekitar 0,8 persen.



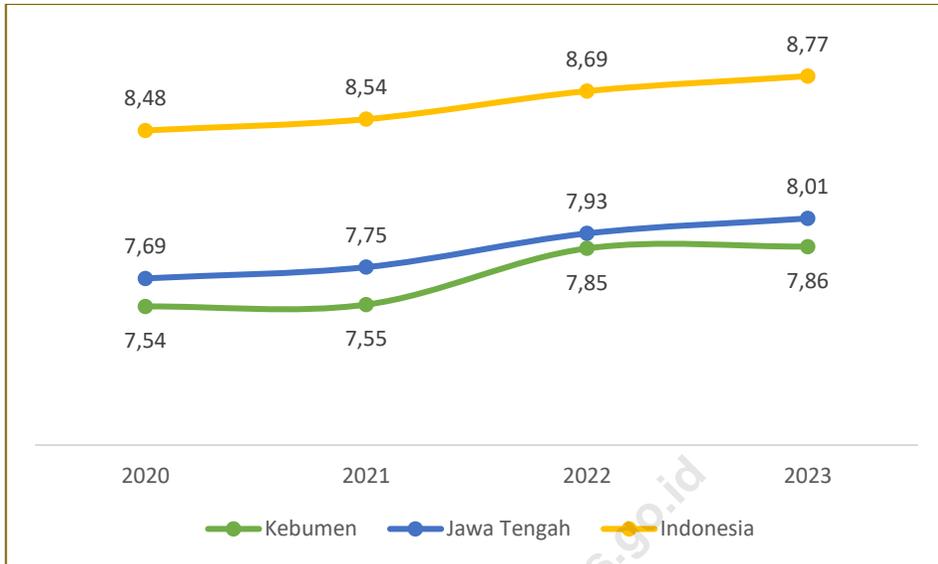
Gambar 3.3. UHH Kebumen, Jawa Tengah, dan Indonesia, 2020 – 2023

Berdasarkan dimensi umur panjang dan hidup sehat, UHH Kebumen selama 2020 – 2023 selalu meningkat. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan berbagai program pembangunan kesehatan di Kebumen. Grafik 3.3 juga menyajikan hal yang menarik. Selama 2020 – 2023, capaian UHH Kebumen selalu lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Jawa Tengah dan Indonesia. Hal ini menandakan bahwa kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, khususnya dalam bidang kesehatan, telah berada pada jalur yang benar. Harapannya dengan bekal kesehatan yang semakin membaik ini dapat membuat penduduk Kebumen semakin produktif secara ekonomi, dan pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan penduduk.



Gambar 3.4. HLS Kebumen, Jawa Tengah, dan Indonesia, 2020 – 2023

Pada dimensi pendidikan, capaian HLS selama 2020 – 2023 terus meningkat. Hal ini menggambarkan bahwa setiap anak yang lahir memiliki harapan yang lebih lama dalam bersekolah. Gambar 3.4 juga menunjukkan HLS Kebumen pada periode tersebut selalu lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Indonesia. Hal yang menarik adalah pada tahun kedua pandemi, tahun 2021, HLS Kebumen mengalami perlambatan, sedangkan HLS Jawa Tengah dan Indonesia tercatat tumbuh positif. Kemudian pada periode berikutnya (2022 – 2023), HLS Kebumen dan Jawa Tengah relatif stagnan yakni rata-rata hanya tumbuh masing-masing sebesar 0,07 persen dan 0,31 persen. Sementara itu HLS Indonesia pada 2022 tercatat tumbuh melambat 0,15 persen, tetapi pada 2023 mampu kembali tumbuh positif 0,38 persen.



Gambar 3.5. RLS (tahun) Kebumen, Jawa Tengah, dan Indonesia, 2020 – 2023

Capaian rata-rata lama sekolah Kebumen dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Indonesia relatif belum optimal. Selama 2020 – 2023, RLS Kebumen selalu di bawah RLS Jawa Tengah dan Indonesia. Namun demikian, sebenarnya selama 2020 – 2022 terdapat hal yang positif yakni RLS Kebumen semakin mendekati RLS Jawa Tengah. Hal ini terlihat dari Gambar 3.5, jarak RLS Kebumen dan Jawa Tengah semakin mengecil. Bahkan pada 2022, RLS Kebumen tercatat mengalami pertumbuhan yang relatif tinggi yakni tumbuh 3,97 persen, sedangkan RLS Jawa Tengah dan Indonesia hanya tumbuh masing-masing sebesar 2,32 persen dan 1,76 persen.

Capaian RLS ini relatif tertahan pada 2023. Pertumbuhan RLS Kebumen, Jawa Tengah, dan Indonesia pada 2023 mengalami perlambatan. Kebumen tercatat mengalami perlambatan yang cukup dalam yakni hanya tumbuh 0,13 persen, sedangkan RLS Jawa Tengah dan Indonesia tumbuh masing-masing sebesar 1,01 persen dan 0,92 persen.



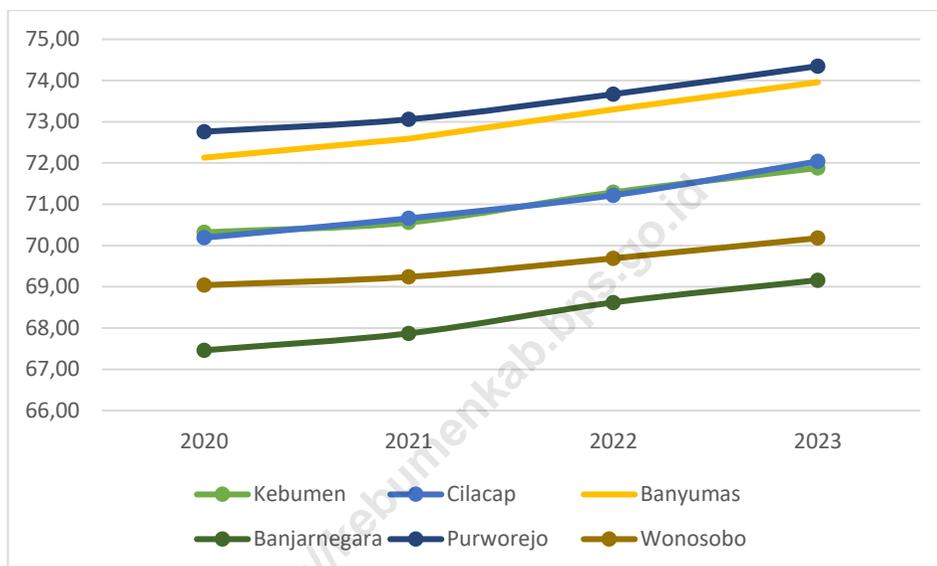
Gambar 3.6. Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Juta Rupiah/kapita/tahun) Kebumen, Jawa Tengah, dan Indonesia, 2020 – 2023

Sama halnya dengan RLS, capaian pengeluaran per kapita disesuaikan Kebumen juga selalu lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Indonesia. Adapun pengeluaran per kapita disesuaikan Jawa Tengah dan Indonesia relatif sama. Pada 2023, pengeluaran per kapita disesuaikan Kebumen tercatat sebesar 9,73 juta rupiah/kapita/tahun, Jawa Tengah sebesar 11,83 juta rupiah/kapita/tahun, dan Indonesia 11,89 juta rupiah/kapita/tahun. Hal ini menggambarkan bahwa standar hidup layak di Kebumen masih menjadi tantangan pembangunan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen harus berupaya memperbaiki capaian dimensi ini, diantaranya melalui berbagai program/kebijakan pengentasan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran terbuka.

3.2. Perbandingan IPM Kebumen dengan Kabupaten/Kota Sekitar

Capaian IPM Kebumen dapat pula dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar, seperti Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Purworejo, dan Wonosobo. Perbandingan ini bukan hanya dari sisi capaian IPM, tetapi juga

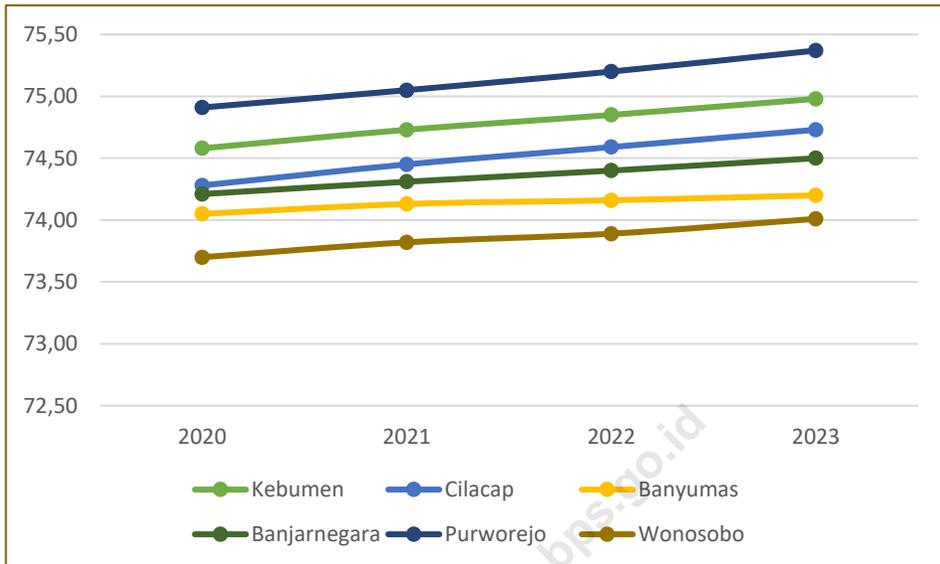
dari sisi dimensi penyusun IPM, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pendidikan, serta standar hidup layak. Secara umum, capaian IPM dan dimensi penyusunnya relatif baik jika dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar. Namun, capaian ini masih menyisakan tantangan khususnya terkait dengan beberapa indikator dalam dimensi penyusun IPM.



Gambar 3.7. IPM Kebumen dan Kabupaten/Kota Sekitar, 2020 – 2023

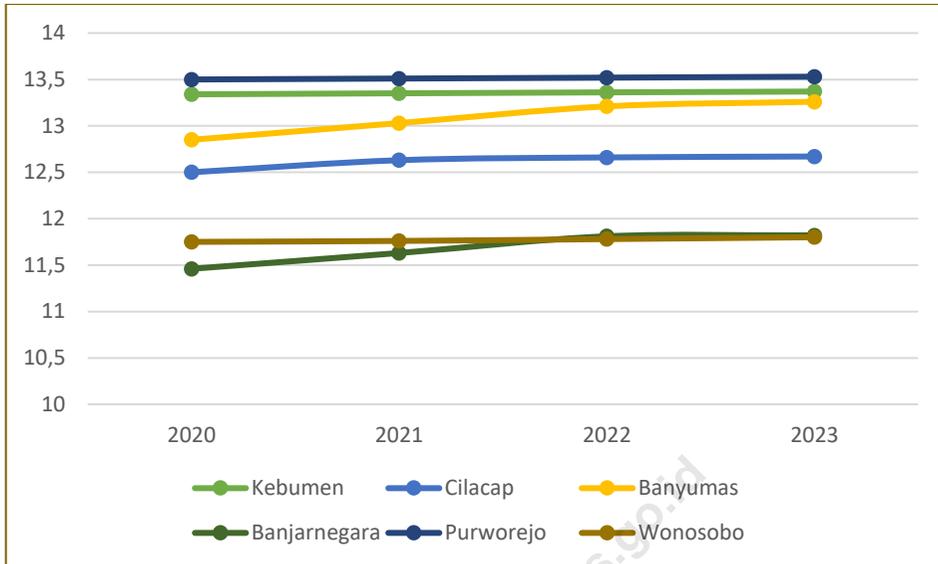
Pada 2020 – 2023, capaian IPM Kebumen selalu lebih tinggi dibandingkan dengan Wonosobo dan Banjarnegara, tetapi masih lebih rendah daripada Cilacap, Banyumas, dan Purworejo. Pada 2023 IPM Kebumen sebesar 71,88, sedangkan Wonosobo dan Banjarnegara masing-masing sebesar 70,18 dan 69,16. Adapun IPM Cilacap sebesar 72,04, Banyumas 73,96, dan Purworejo sebesar 74,35.

Hal yang positif adalah selama tiga tahun terakhir (2021 – 2023), IPM Kebumen semakin mendekati IPM Cilacap. Hal ini terlihat dari Gambar 3.7, yakni jarak antara IPM Kebumen dan Cilacap semakin mengecil. Bahkan pada 2022, IPM Kebumen tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan Cilacap yakni 71,29 berbanding 71,22.



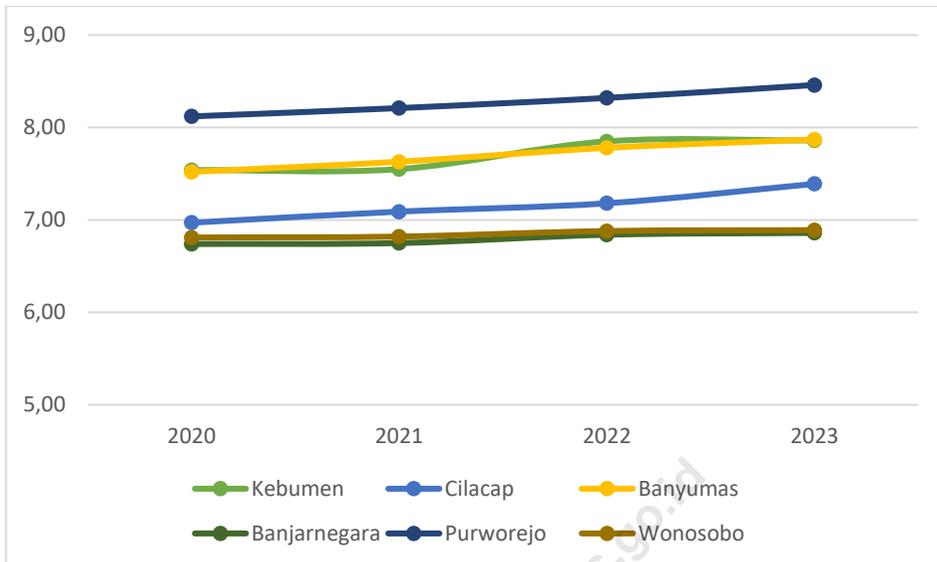
Gambar 3.8. UHH Kebumen dan Kabupaten/Kota Sekitar, 2020 – 2023

Pada 2020 – 2023, capaian dimensi umur panjang dan hidup sehat Kebumen relatif baik jika dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar. Hal ini terlihat pada Gambar 3.8, yaitu UHH Kebumen yang hanya lebih rendah dibandingkan Purworejo, tetapi masih lebih tinggi daripada Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, dan Wonosobo. Pada 2023 UHH Kebumen sebesar 74,98, sedangkan Purworejo sebesar 75,37. Adapun IPM Cilacap sebesar 74,73, Banyumas 74,20, Banjarnegara 74,50, dan Wonosobo sebesar 74,01.



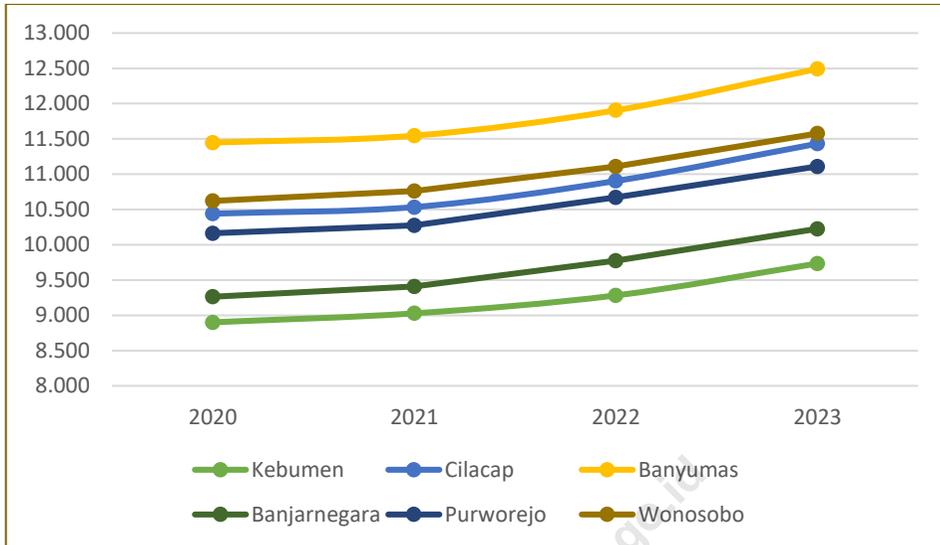
Gambar 3.9. HLS Kebumen dan Kabupaten/Kota Sekitar, 2020 – 2023

Capaian dimensi pendidikan Kebumen, dari sisi HLS, pada 2020 – 2023 relatif baik. Hal ini terlihat pada Gambar 3.9, yaitu HLS Kebumen selalu lebih tinggi dibandingkan Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, dan Wonosobo. Capaian ini selama periode tersebut hanya masih lebih rendah daripada Purworejo. Pada 2023 HLS Kebumen sebesar 13,37. Adapun capaian HLS Cilacap tercatat sebesar 12,67, Banyumas 13,26, Banjarnegara 11,82, dan Wonosobo sebesar 11,80. Sementara itu, capaian HLS Purworejo selalu lebih tinggi yakni 13,37. Hal yang perlu menjadi catatan adalah adanya stagnasi pertumbuhan HLS Kebumen pasca Pandemi COVID-19, selama 2021 – 2023, yakni rata-rata tumbuh 0,07 persen per tahun. Adapun kabupaten/kota lain mampu tumbuh relatif lebih tinggi, seperti Banjarnegara yang rata-rata tumbuh 1,04 persen per tahun.



Gambar 3.10. RLS Kebumen dan Kabupaten/Kota Sekitar, 2020 – 2023

Capaian dimensi pendidikan, terkait RLS tidak jauh berbeda dengan HLS. Pada 2020 – 2023, RLS Kebumen relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Cilacap, Banyumas, dan Banjarnegara. Selama periode tersebut, RLS Kebumen hanya masih lebih rendah daripada Purworejo. Pada 2023, RLS Kebumen tercatat sebesar 7,85 tahun, sedangkan Purworejo sebesar 8,32 tahun. Hal ini berarti penduduk Kebumen berusia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan hingga SMP kelas VIII, sedangkan penduduk Purworejo rata-rata telah hampir menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun. Hal yang perlu diwaspadai adalah pertumbuhan capaian RLS pada 2023 mengalami perlambatan cukup dalam. Pada 2023, RLS Kebumen tumbuh melambat 0,13 persen. Adapun RLS Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, dan Wonosobo juga tumbuh melambat masing-masing sebesar 1,16 persen, 0,29 persen, dan 0,15 persen. Sementara itu, Kabupaten Cilacap dan Purworejo justru mengalami pertumbuhan positif masing-masing sebesar 2,92 persen dan 1,68 persen.



Gambar 3.11. Pendapatan per Kapita yang Disesuaikan Kebumen dan Kabupaten/Kota Sekitar, 2020 – 2023

Diantara dimensi-dimensi pembentuk IPM lain, capaian dimensi standar hidup layak Kebumen relatif masih menjadi tantangan. Hal ini tercermin dari capaian pengeluaran per kapita disesuaikan Kebumen pada 2020 – 2023 yang selalu lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar. Pada 2023, pengeluaran per kapita disesuaikan Kebumen tercatat hanya sebesar 9,73 juta rupiah/kapita/tahun, sedangkan kabupaten/kota sekitar rata-rata telah mencapai lebih dari 10 juta rupiah/kapita/tahun. Walaupun demikian, terdapat hal positif yang patut diapresiasi. Berbagai upaya pemulihan ekonomi pasca Pandemi COVID-19 berhasil meningkatkan capaian dimensi standar hidup layak. Bahkan pada 2023, capaian dimensi ini mencatat pertumbuhan positif tertinggi kedua setelah Banyumas. Pengeluaran per kapita disesuaikan Kebumen pada 2023 mampu tumbuh positif 4,87 persen, sedangkan Banyumas tumbuh positif sebesar 4,93 persen.

Kesimpulan



<https://kebumenkab.bps.go.id>

BAB IV.

KESIMPULAN

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kebumen tahun 2023 telah mencapai 71,88. Dengan capaian ini, Kebumen berada pada posisi status pembangunan manusia kategori 'tinggi'. Capaian tersebut mengantarkan Kebumen pada posisi 23 dari 35 kabupaten/kota dalam pencapaian pembangunan manusia di Jawa Tengah.

Capaian IPM Kebumen pada tahun 2023 merupakan agregasi dari capaian tiga dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diwakili oleh indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) menunjukkan capaian yang baik. Saat ini, rata-rata bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga usia 74,98 tahun atau hampir 75 tahun.

Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS Kebumen sebesar 7,86 tahun. Hal ini berarti secara rata-rata penduduk Kebumen yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,86 tahun atau telah mampu mengenyam pendidikan sampai kelas VII (putus sekolah di kelas VIII). Meskipun capaian RLS tersebut masih harus ditingkatkan, namun pada sisi lain capaian HLS Kebumen memberikan harapan yang lebih cerah, yaitu sebesar 13,37. Hal ini berarti secara rata-rata anak berusia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan pada tahun 2023 diharapkan mampu bersekolah hingga 13,37 tahun atau setara Diploma I.

Dimensi ketiga pembentuk IPM adalah standar hidup layak yang diukur melalui indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Capaian Kebumen dalam dimensi ini pada tahun 2023 sebesar 9,73 juta rupiah/kapita/tahun. Pada dasarnya capaian dimensi ini tercatat tumbuh positif sebesar 4,87 persen dibandingkan dengan tahun 2022. Dengan capaian ini, dibandingkan dengan

kabupaten/kota sekitar, Kebumen tercatat sebagai kabupaten/kota yang mencatat pertumbuhan tertinggi kedua setelah Banyumas. Akan tetapi, secara umum capaian Kebumen dalam dimensi ini masih menjadi tantangan. Selama empat tahun terakhir (2020 – 2023), capaian dimensi ini selalu lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar dan Jawa Tengah secara keseluruhan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus melakukan berbagai terobosan baru untuk meningkatkan standar hidup layak masyarakat. Berbagai terobosan baru tersebut khususnya terkait dengan upaya-upaya pengentasan dan penanggulangan kemiskinan serta penciptaan dan perluasan lapangan pekerjaan.

<https://kebumenkab.bps.go.id>

Referensi



REFERENSI

- Blum, Hendrik L. 1974. *Planning for Health, Development and Application of Social Changes Theory*. New York: Human Sciences Press.
- Haq, Mahbub ul. 1995. *Reflections on Human Development*. New York: Oxford University Press.
- Jaba, Elisabeta, Christiana Brigitte Balan, Ioan-Bogdan Robu. 2014. *The Relationship between Life Expectancy at Birth and Health Expenditures Estimated by A Cross-Country and Time-Series Analysis*. *Procedia Economics and Finance*, 15: 108 – 114.
- Jen, M.H. dkk. 2010. *International Variations in Life Expectancy: A Spatio – Temporal Analysis*. *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie* 101(1), p. 73.
- Mohan, Ramesh dan Sam Mirmirani. 2007. *An Assessment of OECD Health Care System Using Panel Data Analysis*. *Southwest Business & Economics Journal*. 16, p. 21.
- Sen, A. 2003. *Development as Capability Expansion*. New Delhi and New York: Oxford University Press.
- Todaro, Michel P. dan Stepen C. Smith. 2003. *Economic Development* (Eighth Edition). Newyork: Pearson.
- United Nations Development Programme. 1990. *Human Development Report 1990*. New York: UNDP

Lampiran

<https://kebumenkab.bps.go.id>



Lampiran 1. Usia Harapan Hidup (UHH) menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2020 – 2023

Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup (Tahun)			
	2020	2021	2022	2023
Cilacap	74,28	74,45	74,59	74,73
Banyumas	74,05	74,13	74,16	74,2
Purbalingga	73,75	73,82	73,89	73,98
Banjarnegara	74,21	74,31	74,4	74,5
Kebumen	74,58	74,73	74,85	74,98
Purworejo	74,91	75,05	75,2	75,37
Wonosobo	73,7	73,82	73,89	74,01
Magelang	73,97	74,13	74,28	74,44
Boyolali	75,95	76,03	76,12	76,23
Klaten	76,78	76,86	76,95	77,07
Sukoharjo	77,65	77,73	77,82	77,86
Wonogiri	76,16	76,28	76,41	76,56
Karanganyar	77,47	77,55	77,64	77,72
Sragen	75,71	75,79	75,87	75,97
Grobogan	74,75	74,84	74,93	75,04
Blora	74,41	74,51	74,6	74,71
Rembang	74,55	74,61	74,68	74,77
Pati	76,22	76,27	76,32	76,39
Kudus	76,6	76,68	76,76	76,86
Jepara	75,84	75,91	75,97	76,04
Demak	75,4	75,46	75,52	75,6
Semarang	75,73	75,79	75,86	75,95
Temanggung	75,58	75,64	75,7	75,77
Kendal	74,43	74,48	74,53	74,58
Batang	74,69	74,74	74,79	74,85
Pekalongan	73,7	73,75	73,81	73,99
Pemalang	73,61	73,72	73,82	73,98
Tegal	73,63	73,74	73,87	74,01
Brebes	73,44	73,65	73,8	73,95
Kota Magelang	76,85	76,93	77,02	77,22
Kota Surakarta	77,22	77,32	77,43	77,63
Kota Salatiga	77,4	77,55	77,72	77,93
Kota Semarang	77,34	77,51	77,69	77,9
Kota Pekalongan	74,38	74,44	74,51	74,6
Kota Tegal	74,61	74,68	74,77	74,84
Jawa Tengah	74,39	74,49	74,58	74,69

Lampiran 2. Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2020 – 2023

Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah (Tahun)			
	2020	2021	2022	2023
Cilacap	12,50	12,63	12,66	12,67
Banyumas	12,85	13,03	13,21	13,26
Purbalingga	11,99	12,00	12,01	12,02
Banjarnegara	11,46	11,63	11,81	11,82
Kebumen	13,34	13,35	13,36	13,37
Purworejo	13,50	13,51	13,52	13,53
Wonosobo	11,75	11,76	11,78	11,80
Magelang	12,54	12,55	12,58	12,61
Boyolali	12,56	12,57	12,62	12,66
Klaten	13,25	13,39	13,40	13,41
Sukoharjo	13,83	13,84	13,90	13,91
Wonogiri	12,49	12,50	12,51	12,52
Karanganyar	13,68	13,69	13,70	13,71
Sragen	12,83	12,84	12,91	12,92
Grobogan	12,30	12,44	12,45	12,46
Blora	12,20	12,35	12,44	12,51
Rembang	12,11	12,12	12,13	12,15
Pati	12,65	12,94	12,95	12,96
Kudus	13,23	13,24	13,25	13,26
Jepara	12,75	12,76	12,77	12,85
Demak	13,31	13,32	13,33	13,34
Semarang	12,97	12,98	13,04	13,05
Temanggung	12,14	12,32	12,55	12,61
Kendal	12,95	12,96	12,97	12,99
Batang	12,01	12,13	12,14	12,15
Pekalongan	12,41	12,42	12,43	12,44
Pemalang	11,95	11,96	11,98	12,01
Tegal	12,67	12,89	12,91	12,92
Brebes	12,04	12,05	12,15	12,44
Kota Magelang	14,14	14,15	14,31	14,40
Kota Surakarta	14,87	14,88	14,89	14,90
Kota Salatiga	15,41	15,42	15,43	15,44
Kota Semarang	15,52	15,53	15,54	15,55
Kota Pekalongan	12,84	12,85	12,86	12,87
Kota Tegal	13,05	13,07	13,08	13,18
Jawa Tengah	12,7	12,77	12,81	12,85

Lampiran 3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2020 – 2023

Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)			
	2020	2021	2022	2023
Cilacap	6,97	7,09	7,18	7,39
Banyumas	7,52	7,63	7,78	7,87
Purbalingga	7,24	7,25	7,33	7,34
Banjarnegara	6,74	6,75	6,84	6,86
Kebumen	7,54	7,55	7,85	7,86
Purworejo	8,12	8,21	8,32	8,46
Wonosobo	6,81	6,82	6,88	6,89
Magelang	7,78	7,79	7,81	7,82
Boyolali	7,84	7,85	8,08	8,09
Klaten	8,58	8,81	9,09	9,27
Sukoharjo	9,34	9,35	9,62	9,84
Wonogiri	7,33	7,34	7,42	7,67
Karanganyar	8,56	8,57	8,79	9,02
Sragen	7,65	7,66	7,79	7,87
Grobogan	6,91	7,11	7,26	7,28
Blora	6,83	6,99	7,01	7,08
Rembang	7,16	7,30	7,41	7,72
Pati	7,44	7,48	7,79	7,80
Kudus	8,75	8,76	9,06	9,34
Jepara	7,68	7,79	8,09	8,26
Demak	7,71	7,86	8,10	8,27
Semarang	8,02	8,03	8,05	8,07
Temanggung	7,24	7,25	7,41	7,50
Kendal	7,45	7,46	7,71	7,73
Batang	6,87	6,88	6,90	7,07
Pekalongan	6,91	7,17	7,46	7,47
Pemalang	6,42	6,45	6,50	6,55
Tegal	6,98	6,99	7,25	7,34
Brebes	6,21	6,22	6,35	6,40
Kota Magelang	10,39	10,62	10,94	11,20
Kota Surakarta	10,69	10,90	10,92	11,00
Kota Salatiga	10,42	10,66	10,95	11,24
Kota Semarang	10,53	10,78	10,80	10,81
Kota Pekalongan	8,96	9,18	9,20	9,29
Kota Tegal	8,51	8,73	9,00	9,24
Jawa Tengah	7,69	7,75	7,93	8,01

Lampiran 4. Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2020 – 2023

Kabupaten/Kota	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah/kapita/tahun)			
	2020	2021	2022	2023
Cilacap	10.440	10.534	10.904	11.432
Banyumas	11.448	11.546	11.905	12.492
Purbalingga	9.914	10.032	10.277	10.964
Banjarnegara	9.263	9.407	9.776	10.226
Kebumen	8.901	9.028	9.282	9.734
Purworejo	10.163	10.275	10.671	11.110
Wonosobo	10.621	10.760	11.108	11.577
Magelang	9.301	9.440	10.011	10.493
Boyolali	12.910	13.031	13.250	13.716
Klaten	11.921	12.017	12.522	12.968
Sukoharjo	11.325	11.428	11.841	12.319
Wonogiri	9.286	9.429	9.780	10.283
Karanganyar	11.428	11.509	11.798	12.260
Sragen	12.589	12.679	13.052	13.439
Grobogan	10.221	10.294	10.610	11.083
Blora	9.571	9.669	10.067	10.541
Rembang	10.328	10.519	10.937	11.399
Pati	10.390	10.506	10.948	11.385
Kudus	11.160	11.272	11.609	12.088
Jepara	10.343	10.536	10.913	11.306
Demak	10.128	10.248	10.698	11.166
Semarang	11.966	12.070	12.448	12.943
Temanggung	9.343	9.408	9.773	10.108
Kendal	11.425	11.608	11.999	12.755
Batang	9.431	9.524	9.972	10.470
Pekalongan	10.312	10.409	10.707	11.297
Pemalang	8.461	8.573	8.994	9.587
Tegal	9.612	9.700	10.020	10.537
Brebes	10.058	10.152	10.514	10.993
Kota Magelang	12.210	12.349	12.816	13.175
Kota Surakarta	14.761	14.911	15.463	15.870
Kota Salatiga	15.699	15.843	16.351	16.650
Kota Semarang	15.243	15.425	16.047	16.420
Kota Pekalongan	12.467	12.598	13.158	14.056
Kota Tegal	12.999	13.143	13.455	14.013
Jawa Tengah	10.930	11.034	11.377	11.835

Lampiran 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2020 – 2023

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia			
	2020	2021	2022	2023
Cilacap	70,19	70,66	71,22	72,04
Banyumas	72,13	72,59	73,30	73,96
Purbalingga	69,23	69,41	69,80	70,51
Banjarnegara	67,46	67,87	68,62	69,16
Kebumen	70,32	70,56	71,29	71,88
Purworejo	72,76	73,06	73,67	74,35
Wonosobo	69,04	69,24	69,69	70,18
Magelang	69,98	70,23	70,96	71,56
Boyolali	74,25	74,40	74,97	75,41
Klaten	75,56	76,12	76,95	77,59
Sukoharjo	76,98	77,13	77,94	78,65
Wonogiri	70,25	70,49	71,04	71,97
Karanganyar	75,86	75,99	76,58	77,31
Sragen	73,95	74,08	74,65	75,10
Grobogan	69,87	70,41	70,97	71,49
Blora	68,84	69,37	69,95	70,63
Rembang	70,02	70,43	71,00	71,89
Pati	71,77	72,28	73,14	73,59
Kudus	75,00	75,16	75,89	76,71
Jepara	71,99	72,36	73,15	73,85
Demak	72,22	72,57	73,36	74,07
Semarang	74,10	74,24	74,67	75,13
Temanggung	69,57	69,88	70,77	71,33
Kendal	72,29	72,50	73,19	73,86
Batang	68,65	68,92	69,45	70,20
Pekalongan	69,64	70,11	70,81	71,45
Pemalang	66,40	66,64	67,26	68,08
Tegal	69,28	69,67	70,42	71,12
Brebes	67,90	68,10	68,81	69,71
Kota Magelang	78,99	79,43	80,39	81,17
Kota Surakarta	82,21	82,62	83,08	83,54
Kota Salatiga	83,14	83,60	84,35	84,99
Kota Semarang	83,05	83,55	84,08	84,43
Kota Pekalongan	74,98	75,40	75,90	76,71
Kota Tegal	75,14	75,59	76,21	77,06
Jawa Tengah	71,88	72,17	72,8	73,39

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KEBUMEN**

JL. Arungbinang No. 17 A, Kebumen 54311. Telp/Fax: (0287) 381163
Homepage: <http://kebumenkab.bps.go.id> Email: bps3305@bps.go.id